

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah :

3.1.1 Permasalahan Pembangunan

1.1 Pemerintahan

1. Akuntabilitas kinerja pemerintahan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
2. Pelaksanaan Reformasi birokrasi belum optimal
3. Penyelenggaraan pelayanan public belum optimal
4. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum seluruhnya berjalan dengan efektif
5. Sinergi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
6. Implementasi kerja sama antar daerah belum berjalan secara optimal
7. Keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah sering dengan kebijakan moratorium PNS

3.1.2 Sosial Budaya

2.1 Sosial

1. Angka kemiskinan masih cukup tinggi;
2. Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan social dasar masih kurang;
3. Sistem jaminan social masyarakat yang berkelanjutan belum menjangkau seluruh penduduk yang berhak;
4. Kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan social masyarakat belum efektif
5. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
6. Penanganan dan pelayanan masalah social bagi penyandang disabilitas , penduduk lanjut usia dan penduduk rawan social lainnya , dalam rangka mendorong kemandirian serta memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan social belum berjalan seperti yang di harapkan.

2.2. Pendidikan

1. Harapan lama sekolah penduduk masih rendah;
2. Masih adanya anak putus sekolah;
3. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal
4. Standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi
5. Capaian standar nasional pendidikan sebagai keberlanjutan dari standar pelayanan minimal belum merata dan optimal;
6. Jumlah dan distribusi tenaga kependidikan belum merata;
7. Pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan local yang berwawasan global serta teknologi informasi belum dikembangkan dengan baik;
8. Atmosfir yang kondusif dan infra struktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, pengembanaan wawsan keilmuan belum tercipta;
9. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, untuk memberikan landasan pada keberlanjutan pendidikan dn berorientasi pembentukan karakter kewirausahaan, belum optimal;
10. Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sesuai harapan;
11. Daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan.

2.3. Kesehatan

1. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk menyelenggarakan layanan yang bermutu;
2. Jumlah dan distribusi pelayanan keshatan rujukan terbatas dan belum merata;
3. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
4. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat keshatan yang lebih baik masih perlu di tingkatkan;
5. Profesionalisme tanaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedic, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan;
6. Sistem Jamininan Pemeliharaan kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Gunungkidul belum optimal.

2.4. Kebudayaan

1. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi local belum optimal;

2. Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal;
 3. Budaya sebagai asset dalam membangun jati diri dan mewarisi seganeap sector kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk menarik kunjungan dan perhatian pihak luar dalam skal regional, nasional dan internasional belum di kelola secara optimal;
 4. Perlindungan hokum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun no fisik dalam bentuk Hak Atas Kekeayaan intelektual (HAKI) bangsa belum optimal;
 5. Kebudayaan social belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya, dan sejarah;
 6. Budaya penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal;
- 2.5. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
1. Pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja
 2. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
 3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
 4. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
 5. Kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking), dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih etrjadi;
- 2.6. Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi
1. Peningkatan miutu dan produktifitas tenaga kerja malalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan belum optimal
 2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang dilaksnakan belum semua sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 3. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal;
 4. Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapanagan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih rendah;

5. Pemetaan potensi local untuk pemberdayaan tenaga kerja belum tergarap secara optimal;
- 3.1.3 Kependudukan dan Keluarga Berencana
1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup mengakibatkan bertambahnya penduduk usia lanjut yang perlu mendapatkan layanan
 2. Penduduk Usia prpduktif dan terdidik cenderung memilih meninggalkan daerah untuk mencari kerja ke kota;
 3. Kualitas keluarga sebagai dasar untuk mewujudkan ketahanan keluarga belum mendapatkan perhatian yang memadai;
 4. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk (total fertility rate)
- 3.1.4 Ekonomi, Pariwisata, dan Sumber daya Alam
- 4.1. Investasi
1. Insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan investasi belum berjalan optimal;
 2. Kualitas dan Kapasitas kelembagaan pelayanan investasi belum optimal;
 3. Daya dukung terhadap peluang investasi unggulan belum siap;
 4. Inovasi dan upaya Promosi belum optimal;
 5. Dukungan infra struktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang;
 6. Realisasi Investasi masih rendah.
- 4.2. Industri
1. Daya saing produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum optimal;
 2. Penggunaan bahan baku lokal; belum optimal dan tergantung bahan baku /penolong impor;
 3. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah Belum komprehensif dan berkelanjutan;
 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) ;
 5. Kemampuan teknologi kecil Menengah (IKM) masih kurang
- 4.3. Perdagangan
1. Akses Pasar yang masih rendah
 2. Inovasi dan jaringan pemasaran serta pemberian fasilitas masih kurang mendukung
 3. Kearsaan Produsen dan Konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang

4. Terbatasnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berorientasi ekspor
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri
6. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar lokal/domestik.

4.4. Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih terbatas;
2. Lama tinggal wisatawan masih rendah;
3. Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya belum optimal;
4. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai;
5. Kualitas pelayanan bagi wisatawan belum semuanya memenuhi standar;
6. Upaya dan inovasi dalam pemasaran, promosi, dan *event* pariwisata masih kurang;
7. Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;
8. Pengembangan produk pariwisata belum optimal karena masih terbatasnya investasi di bidang pariwisata;
9. Manajemen dan pengelolaan geo tapak taman bumi (*geosite geopark*) belum optimal;
10. Ketergantungan pada destinasi daerah lain masih cukup tinggi.

4.5. Ketahanan Pangan

1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
2. Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
4. Masih adanya desa rawan pangan;
5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah.

4.6. Peratanian

1. Belum terwujudnya penyaluran dan pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani secara optimal;
2. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian;

3. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal;
4. Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
5. Produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan.

3.1.5. Prasarana Wilayah

5.1 Sumber daya air

1. Potensi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan bentang alam *karst*.
3. Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal.
4. Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah;
5. Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan;
6. Konservasi terhadap daerah tangkapan air (*catchment area*) belum berjalan optimal;
7. Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan lingkungan;

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penggunaan lahan

Berdasarkan data tahun 2016, luas penggunaan lahan sebagian besar 5403,35 Ha (75,30%) merupakan penggunaan lahan kering, yang umumnya tegalan, kebun dan lahan kosong (semak). Sedangkan area terbangun (pemukiman) memanfaatkan 466,81 Ha (6,51%) dari seluruh luas area Kecamatan Purwosari (7175,99 Ha). Area lainnya adalah hutan negara seluas 319,76 Ha dan 805,77 Ha (11,23%) merupakan penggunaan jalan, makam dan telaga. Tanah sawah memanfaatkan lahan seluas 105,30 Ha (1,47 %) dengan sebagian kecil sawah menggunakan sistem pengairan sederhana di Desa Girijati dan Desa Giritirto, selebihnya adalah sawah tadah hujan yang hanya dibudidayakan pada musim penghujan. Berdasarkan data diatas potensi untuk berkembang Kecamatan Purwosari terutama di bidang pertanian cukup besar sekalipun terhalang dengan kondisi alam yang tidak terlalu memungkinkan. Perkembangan akan arah pada tumbuhnya lahan - lahan pertanian terutama penggunaan lahan kering.

2. Jenis dan Kondisi Bangunan

Berdasarkan data di lapangan semua warga telah memiliki tempat tinggal, yang terdiri bangunan layak huni 5992 rumah/KK dan tidak layak huni 66 rumah/KK. Jenis bangunan perdagangan atau tempat usaha :

- a. Pasar
- b. Kios/toko
- c. Koperasi

Bangunan perkantoran terdiri dari :

- a. Kecamatan
- b. KUA
- c. Puskesmas
- d. Polsek
- e. UPT TK dan SD
- f. BPP
- g. Sekolah :
 - PAUD/TK
 - SD (13 Sekolah)
 - SMP (3 sekolah)
 - SLTA (1 sekolah)
 - SLB (1 sekolah)
- h. LKM

Apabila ditinjau perdaerah terbangunnya wilayah, maka Koefisien Dasar Bangunan (luas dasar bangunan per luas lahannya) masih rendah berkisar antara 30–50%. Bentuk rumah pada umumnya kampung dengan Koefisien Dasar Bangunan yang relatif rendah, maka terbuka peluang penataan lingkungan ke arah yang lebih terprogram.

3. Fasilitas Lingkungan

Secara umum fasilitas lingkungan yang terbesar di seluruh wilayah Kecamatan Purwosari mampu melayani kebutuhan/menampung aktifitas penduduknya. Berdasarkan pengamatan, kondisi fisik fasilitas yang ada terlihat cukup baik dan memadai. Kini di Kecamatan Purwosari telah mempunyai sekolah lanjutan atas (SMKN) yang mampu menampung lulus SMP di seluruh Kecamatan Purwosari, namun demikian warga masih menghendaki adanya satu Sekolah Lanjutan Atas (SMAN) dengan harapan apa yang menjadi aspirasi siswa lulus SMP bisa seluruhnya bisa

tertampung, berdasarkan data yang ada siswa yang masuk di SMKN Purwosari tidak hanya berasal dari Kecamatan Purwosari bahkan siswa banyak berasal dari Kecamatan Panggang. Tentu perencanaan ini harus didasarkan pada prediksi perkembangan penduduk dimasa mendatang.

Sebagai kecamatan tergolong masih baru, maka kebutuhan standar akan fasilitas pelayanan lingkungan perlu segera diadakan, antara lain Koramil , Kantor Pos , Bank dan sebagainya.

Fasilitas lain yang tidak kalah penting di wilayah perencanaan adalah fasilitas pendukung pariwisata. Hal ini perlu diantisipasi mengingat potensi pariwisata di wilayah perencanaan cukup banyak tersebar di beberapa desa. Beberapa penginapan telah tersedia di desa Girijati, oleh karena itu harus dibarengi dengan pengembangan fasilitas pendukung seperti pos peristirahatan, MCK dan juga prasarana jalan dan air bersih. Demikian juga dengan banyaknya kelompok kesenian di wilayah perencanaan, maka diperlukan wadah untuk memprentasikan karya seni penduduk. Dalam hal ini eks kantor kecamatan di Padukuhan Jlumbang dapat dimanfaatkan untuk sanggar kesenian, yang dapat mengakomodasi kegiatan seni budaya masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.

4. Jaringan Pergerakan

Jaringan jalan yang ada di Kecamatan Purwosari terdiri atas :

a. Jalan Nasional /JJLS

- Girijati – Giripurwo = 12 km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus

b. Jalan Propinsi

- Panggang – Girijati = 10 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus

c. Jalan Kabupaten

- Panggang – Klampok = 2 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus
- Petoyan – Jlumbang = 4 Km, Aspal Hotmix kondisi jalan bagus

d. Jalan Desa

- IKK Nglegok – Gading = 3 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Ploso – Goa Cerme – Ngepal = 4 Km, Aspal 300 meter kondisi rusak berat
- Ploso – Banyumeneng = 3 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Trasih – Giricahyo = 4 Km, Aspal 1 km kondisi jalan rusak
- Njelok Parangrejo – Gua Langse = 1 Km, Aspal 300 m bagus 700 m rusak

Selebihnya dari jalan tersebut adalah berbatu dan tanah. Jalan aspal ada dua jalur, pertama jalur selatan dari kecamatan Panggang – Giripurwo, Giricahyo, Giriasih, Girijati ke arah Parangtritis dengan lebar 14 m dan merupakan jalan Nasional. Kedua jalur utara dari kecamatan Panggang – Giripurwo – Giritirto - Girijati ke arah Parangtritis lebar 4 meter. Jalan tembus yang dapat menghubungkan kedua jalan tersebut yaitu melalui (Toyan) Giritirto – Jlumbang (Giripurwo) jalan beraspal dengan kondisi jalan bagus, selain itu ada jalan aspal desa/IKK yang keadaan rusak. Beberapa segmen jalan tembus ini cukup terjal sehingga perlu didesain dengan baik dan diperbaiki kemiringan jalannya agar dapat memberikan akses yang baik dari desa-desa menuju ke kota Kecamatan. Dengan perbaikan jalan tembus ini, maka jarak desa-desa ke kota Kecamatan relatif dekat yaitu 4,5 km. Semua jalan yang ada tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan, baik di kiri maupun kanan jalan, sehingga perlu penambahan saluran drainase dan perlu dilengkapi pagar pengaman jalan.

Jaringan transportasi , khususnya angkutan umum perlu dicarikan solusi agar mobilitas penduduk dan roda ekonomi desa-desa di lingkungan Kecamatan Purwosari meningkat. Kendala yang ada saat ini selain sebagian besar jalan masih berupa jalab batu dan tanah topografi lingkungan juga menyulitkan karena tingkat kemiringan yang terjal, sehingga secara teknik kontruksi memerlukan biaya yang cukup tinggi.

5. Jaringan Utilitas

a. Air bersih

Kebutuhan air bersih penduduk di Kecamatan Purwosari umumnya diperoleh dari sumur/air tanah

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terletak, juga sumber air dari telaga dan mata air yaitu Ngeleng, Gabug dan Ploso meski baru mencukupi sebagian penduduk. Seperti umumnya wilayah Gunungkidul, kebutuhan akan air bersih selalu menjadi masalah, sehingga harus ada dropping air bersih dari pemerintah Daerah Kabupaten setiap tahunnya. Jaringan pipa air bersih sebenarnya telah ada dan cukup baik namun tidak berfungsi permasalahan debit air yang kurang memadai.

b. Drainase, Sanitasi dan Sampah

Sistem drainase di Kecamatan Purwosari pada umumnya masih sederhana dan bersifat lokal artinya pembuangan air hujan lebih banyak dialirkan ke sumur resapan atau ladang terbuka. Sedangkan system pembuangan air limbah yang berasal dari rumah tangga menggunakan system on-site , dengan sumur resapan sebagai akhir pembuangan. Hal ini mengingat kepemilikan lahan yang rata-rata masih relatif luas/longgar sehingga masih memungkinkan membuat sumur resapan di halaman rumah . Untuk pembuangan sampah baik pribadi maupun di tempat-tempat umum, umumnya masih dilakukan dengan cara menimbun atau mengumpulkan di halaman dan kemudian dibakar.

c. Jaringan listrik

Meski kondisi di lapangan menunjukkan bahwa semua desa di Kecamatan Purwosari telah teraliri listrik. Namun demikian jika melihat data Kecamatan Purwosari jumlah KK yang ada sebesar 5251 terlayani listrik 4812 KK , tak terlayani 110 atau dengan rincian Giripurwo terlayani, 1837 KK; tak terlayani 28 KK, Giricahyo terlayani 1201 KK, Girijati terlayani 522 KK: tak terlayani 46 KK, Giriasih terlayani 342 KK: tak terlayani 35 KK, Giritirto terlayani 910 KK: tak terlayani 1 KK.

d. Jaringan telepon

Sampai dengan tahun 2013 sambungan telepon yang ada di Kecamatan Purwosari baru mencapai 4 buah sambungan pribadi dari 5251 rumah tangga yang terdapat di Kecamatan Purwosari. Namun pada tahun 2013 telah terdapat jaringan telepon seluler sampai ke 5 desa yaitu Giripurwo, Giricahyo, Girijati, Giriasih dan Giritirto dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 5023 KK.

3.3.Isu Strategis

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan

moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum semua Perangkat Daerah mempunyai Standar Pelayanan. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.

Reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.

2. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Permasalahan di bidang pendidikan akan diatasi dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di bidang kebudayaan akan dilakukan peningkatan fasilitasi kekayaan budaya dan nilai tradisi dan pelestarian nilai budaya. Di bidang kesehatan ke depan akan diatasi dengan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diiringi dengan akreditasi Puskesmas, pendampingan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS yang terpadu lintas bidang. Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru.

3. Belum mantapnya ketahanan ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan

Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal sehingga ASEAN akan bersifat lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang menerapkan inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor produksi yang sangat penting.

4. Belum optimalnya pengelolaan dan daya saing pariwisata.

Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional sehingga mampu bersaing dan menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Kondisi ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Perkembangan kunjungan wisatawan yang meningkat 256% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan yang signifikan. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi *Geopark* dalam satu kesatuan Gunungsewu *UNESCO Global Geopark*, untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Event wisata untuk menarik wisatawan mancanegara perlu diintensifkan dan ditingkatkan dengan prioritas pada event wisata yang mendunia dan berkelas internasional.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah untuk mewujudkan konektivitas dan akses antar wilayah untuk mendukung pariwisata

Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh beban penggunaan prasarana infrastruktur yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk

dan penggunaan sarana lalu lintas serta ketidakseimbangan antara penyediaan prasarana sarana publik sesuai rencana tata ruang terhadap desakan pemanfaatan ruang. Kondisi infrastruktur ini disertai dengan belum optimalnya layanan transportasi umum yang disebabkan minimnya minat pengguna dan terbatasnya sarana dan prasarana. Dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, infrastruktur perekonomian khususnya penunjang pariwisata juga masih perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya. Permasalahan infrastruktur dapat diatasi dengan meningkatkan proporsi jalan dan jembatan dalam kondisi baik, sarana perhubungan, ruang terbuka publik, pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat dan peningkatan sarana prasarana perekonomian untuk mengembangkan perekonomian dan pariwisata.

6. Percepatan pembangunan kawasan pesisir pantai selatan secara terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar”.

Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu menjadikan laut sebagai halaman muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengisi dan merealisasikan keistimewaan melalui pembangunan daerah di segala bidang secara terpadu dan sinergis.

7. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai yang tertuang dalam Visi Misi Bupati terpilih tahun 2016 – 2021 Kabupaten Gunungkidul adalah :

Visi :

” Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021 ”

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional, nasional, dan internasional. Kondisi ini ditandai dengan:

1. Obyek wisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar :
 - a. Fasilitas umum (Tempat Ibadah, parkir, ruang terbuka publik);
 - b. Sarana penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, dan persampahan;
 - c. Pos terpadu (Layanan Informasi,Kesehatan,SAR);
 - d. Jaringan listrik;
 - e. Sarana telekomunikasi.
2. Akses menuju obyek wisata dalam kondisi baik;
3. Manajemen pengelolaan obyek wisata yang berkualitas;
4. Manajemen pelayanan kepariwisataan yang berkualitas;
5. Penyelenggaraan *event* yang modern dan professional serta mendukung peningkatan daya tarik wisata.

Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan :

1. Perilaku masyarakat yang ramah dan sopan;
2. Perilaku hidup bersih;

3. Budaya jujur, tertib, dan disiplin;
4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah;
5. Arsitektur dan ornamen bangunan bercirikan lokal.

Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif.

Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penjelasan misi sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan tata pemerintahan dengan berlandaskan asas prinsip *good governance* melalui sinergisme antar *stakeholders* pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan dan manajemen pembangunan daerah. Prinsip yang menjadi landasan *good governance* adalah:

1. Akuntabilitas yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya tanggap yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi dan efektifitas yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

6. Transparansi yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan (*strategic vision*) yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan hukum adalah mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di segala bidang melalui *human investment* sebagai pilar pokok pembangunan daerah. Upaya tersebut sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia Gunungkidul seutuhnya dan masyarakat Gunungkidul seluruhnya yaitu mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sumber daya pembangunan manusia. Sebagai insan memberikan tekanan pada [harkat](#), [martabat](#), [hak](#), dan [kewajiban](#) manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi [etika](#), [estetika](#), maupun [logika](#) yang meliputi nilai-nilai [rohaniah](#), [kepribadian](#) dan [kejuangan](#).

Misi 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Perguruan tinggi, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) dengan didukung sumber daya manusia yang dapat turut membentuk [sikap](#) dan [perilaku](#) serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh tersebut merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme.

Misi 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam membangun konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kondisi jalan dan jembatan, sarana-prasarana transportasi dan telekomunikasi dalam rangka percepatan pembangunan dan dukungan bagi pengembangan potensi pariwisata, serta penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berupa air bersih, irigasi, dan sanitasi yang merata di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Misi 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.

Misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguat bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Misi 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang lestari berorientasi pada pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan untuk mendukung misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan visi Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016 - 2021. Tugas dan fungsi yang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul antara lain : pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

1. Keterbatasan kuantitas dan kompetensi teknis sumberdaya aparatur Kecamatan.
2. Kondisi geografis wilayah yang berbukit dan sebagian rawan bencana
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja pelayanan
4. Keterbatasan pendanaan
5. Keterbatasan ketrampilan angkatan kerja
6. Keterbatasan tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat

Adapun faktor-faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah :

1. Semangat dan motivasi kerja dari aparatur kecamatan dan desa yang tinggi.
2. Adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik
3. Koordinasi yang mantap dengan pemerintah desa dan instansi tingkat kecamatan.
4. Terbukanya akses informasi dan komunikasi
5. Terbukanya akses jalan jalur pantai selatan (Pansela)
6. Adanya lingkungan kerja yang kondusif
7. Tingginya semangat gotong-royong masyarakat
8. Tingginya kesadaran hukum masyarakat.
9. Adanya sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
10. Ketersediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait tata ruang wilayah serta kajian lingkungan hidup kecamatan Purwosari merupakan pintu gerbang utama barat selatan yang mau tidak mau mengikuti arus kemajuan pariwisata karena dampak dari pantai Parangtritis akan naik di kecamatan Purwosari baik itu secara efek ekonomi ataupun kriminalitas hanya saja antisipasi yang kita persiapkan. Mengingat tata ruang akan merubah situasi disekelilingnya seperti dibukanya jalur lintas selatan (JJLS) akan mempengaruhi :

1. Bidang perekonomian meningkat
2. Transportasi lancar
3. Investasi meningkat
4. Harga jual tanah disepanjang JJLS otomatis akan jauh lebih tinggi
5. Bidang pendidikan meningkat.

Namun efek dari terbangunnya tata ruang wilayah/ JJLS antara lain :

1. Angka kriminalitas meningkat
2. Angka kecelakaan lalu lintas meningkat
3. Sampah dari wisata bertambah
4. Bagi orang yang belum siap adanya tata ruang wilayah hanya menjadi penonton.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dilakukan melalui analisis lingkungan internal, eksternal dan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal meliputi dua aspek yakni kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*). Yang dimaksud faktor kekuatan adalah faktor – faktor yang bersifat menguntungkan dan menjadi potensi untuk dikembangkan sehingga bisa menunjang / mendukung berbagai program kegiatan.

Sedang yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam organisasi dan dapat menghambat pelaksanaan program dan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasar analisis, faktor – faktor Lingkungan Internal yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kecamatan Purwosari adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk bekerja dengan baik.
- 2) Adanya kejelasan dan kepastian peraturan perundangan yang menjadi landasan keberadaan dan ketugasan Kecamatan Purwosari yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Kecamatan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2006 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan
- 3) Adanya Koordinasi yang mantap. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kegiatan dilingkup kecamatan dan desa, termasuk dinas / instansi / UPTD yang senantiasa terjalin kerja sama dan saling memberikan dukungan untuk melaksanakan tugas dan mengatasi permasalahan yang ada.
- 4) Adanya motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparat Kecamatan Purwosari dan Pemerintah Desa, sehingga mampu mendorong dan meningkatkan kegiatan untuk semakin aktif dalam mempercepat penyelesaian tugas – tugas kedinasan.

b. Kelemahan

- 1) Kurangnya jumlah SDM Seksi tata pemerintahan
- 2) Belum optimalnya kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain prasarana kantor dan kelengkapan kerja.
- 4) Keterbatasan kompetensi teknis aparatur Kecamatan

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal meliputi Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat*). Peluang adalah faktor dari luar organisasi yang dapat memberikan kontribusi positif untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi. Sedangkan Ancaman adalah faktor dari luar organisasi yang dapat menghambat atau membahayakan jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan analisis, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi Kecamatan Purwosari dalam pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

a. Peluang

- 1). Kejelasan petunjuk teknis siklus tahunan desa.
- 2). Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa
- 3). Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa.
- 4). Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa

b. Ancaman

- 1). Kuantitas SDM aparatur Kecamatan dan desa belum optimal.
- 2). Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa.
- 3). Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa.
- 4). Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa.

Tabel . 3.1

MATRIKS IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN (S)	PELUANG (O)
1. Komitmen pimpinan yang tinggi. 2. Kepastian dan kejelasan peraturan dan perundangan tentang kecamatan dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Koordinasi yang mantap 4. Motifasi dan semangat kerjanya yang tinggi dari aparatur kecamatan	1. Kejelasan petunjuk teknis siklus tahunan desa. 2. Kepastian dan kejelasan peraturan perundang-undangan tentang manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa 3. Adanya bimbingan teknis bagi perangkat desa dan lembaga desa. 4. Tersedianya sarana IT dan jaringan internet di desa.
KELEMAHAN (W)	ANCAMAN (T)
1. Kurangnya jumlah SDM Seksi tata pemerintahan. 2. Kualitas SDM aparatur belum optimal 3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang 4. Kompetensi teknis aparatur Kecamatan terbatas.	1. Kuantitas SDM aparatur Kecamatan dan desa belum optimal. 2. Belum terisinya beberapa formasi perangkat desa. 3. Rendahnya kapasitas perangkat desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa. 4. Terjadinya gangguan teknis pada sarana IT dan jaringan internet di desa.

Tabel. 3.2.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

NO	FAKTOR – FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
----	------------------------------------	-------	--------	------	----------------------

	<u>KEKUATAN</u>				
1.	Motivasi dan semangat kerja yang tinggi dari aparatur kecamatan	15	4	60	I
2.	Koordinasi yang mantap	10	4	40	IV
3.	Komitmen pimpinan	15	3	45	III
4.	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang jelas dan terarah	15	4	60	II
5.	Kepastian dan kejelasan peraturan perundangan yang berkait dengan keberadaan dan ketugasan kecamatan	10	3	30	V
	<u>KELEMAHAN</u>				
1.	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	20	4	80	I
2.	Kinerja Aparatur Kecamatan Purwosari belum optimal	15	3	45	III
3.	Belum optimalnya pendayagunaan aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa.	15	3	45	IV
4.	Kompetensi teknis aparatur Kecamatan terbatas.	15	3	45	II
5.	Tingkat kesejahteraan pegawai masih terbatas	10	3	30	V
	T O T A L	100			

Tabel 3.3

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAFE)

NO	FAKTOR – FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
	<u>PELUANG</u>				
1.	Kamtibmas sangat kondusif	10	3	30	II
2.	Semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan masyarakat	10	2	20	IV
3.	Potensi peternakan, kerajinan rakyat dan pariwisata	15	4	60	I
4.	Ketersediaan sumberdaya air	10	3	30	III
5.	Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah	10	2	20	V
	<u>ANCAMAN</u>				
1.	Kuantitas aparatur Kecamatan kurang	15	4	60	I
2.	Sarana transportasi umum terbatas	10	2	20	V
3.	Kondisi alam dan medan yang berat,	10	3	30	III
4.	Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah	10	4	40	II
5.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	10	3	30	IV
T O T A L		100			

